


Pengaruh Pengetahuan Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Organisasi

Syafruddin¹, Muhammad Akob², Hisnol Jamali³

^{1,2,3}Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya, Makassar, Indonesia

<p>Info Artikel</p> <hr/> <p>Sejarah Artikel: Diterima: Februari, 2024 Disetujui: Februari, 2024 Dipublikasi: Maret, 2024</p> <hr/> <p>Kata kunci: sumber daya manusia; Teknologi informasi; pengelolaan keuangan.</p> <p>Keywords: <i>Human resource; Information technology; Financial management.</i></p> <hr/> <p>Corresponding Author: Syafuruddin Email: cafacool@yahoo.com</p>	<p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini mengeksplorasi dampak kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan lingkungan kerja terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan mengumpulkan data melalui kuesioner daring yang diberikan kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan OPD. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, sedangkan teknologi informasi dan lingkungan kerja masih memiliki ruang untuk peningkatan. Pengujian validitas menegaskan kualitas data yang diperoleh. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah, dengan fokus pada Kota Makassar.</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>This study explores the impact of human resource competencies, information technology, and work environment on the effectiveness of financial management in the Regional Apparatus Organization (OPD) of Makassar City. A quantitative approach was employed, collecting data through online questionnaires distributed to employees involved in OPD financial management. The analysis results indicate that the human resource competency variable exhibits a high level of satisfaction, whereas information technology and the work environment still have room for improvement. Validity testing confirms the quality of the obtained data. This research provides in-depth understanding of the factors influencing financial management effectiveness at the local government level, with a focus on Makassar City.</i></p> <p style="text-align: center;">© 2024 Syafruddin, Muhammad Akob, Hisnol Jamali This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license</p> <div style="text-align: right;">  </div>
--	--

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangannya. Ketika anggaran daerah dikelola dan dijalankan dengan baik, daerah tersebut akan mengalami perkembangan yang signifikan. Pengelolaan keuangan yang efektif akan memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan organisasi, program, atau kegiatan (Koromath, 2020). Dengan demikian, optimalisasi anggaran menjadi kunci yang penting untuk memastikan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh (Hastomo et al., 2021). Laporan keuangan memiliki peran sentral

dalam memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan pencapaian selama periode anggaran yang bersangkutan. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pengelolaan keuangannya, yang harus didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk memastikan kelengkapan, ketepatan, dan keakuratan data. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi penting karena kemajuannya telah memberikan dampak signifikan dalam proses pengolahan data, komunikasi, dan penyampaian informasi secara lebih cepat dan akurat.

Sistem informasi akuntansi berbasis digital telah menjadi pilihan utama bagi berbagai perusahaan, instansi, dan pemerintahan untuk memfasilitasi para akuntan atau pengelola keuangan dalam menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah, yang mencakup setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, melibatkan penyelenggaraan sistem akuntansi Pemerintah Daerah. Proses ini melibatkan langkah-langkah dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan dalam konteks pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Tingkat keandalan laporan keuangan sangat terkait dengan keandalan sistem informasi akuntansi yang dijalankan oleh instansi pemerintah. Pengembangan sistem akuntansi harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah dan mempertimbangkan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan, termasuk dukungan teknologi informasi. Pemerintah telah mengadopsi perkembangan teknologi informasi berbasis komputer dalam mengelola keuangan negara, terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Semua langkah tersebut bertujuan untuk mencapai laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, yang merupakan aspek penting dalam terwujudnya tata kelola yang baik. Namun, upaya untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tingkat kabupaten/kota sering mengalami hambatan, salah satunya adalah ketidakmemadainya sistem informasi yang digunakan.

Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang memberikan informasi mengenai situasi keuangan dan transaksi yang terjadi di entitas pelaporan selama periode tertentu. Manajemen laporan keuangan harus berjalan secara efisien agar dapat menghasilkan laporan yang berkualitas, relevan, kredibel, dapat dipercaya, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, berbagai faktor pendukung diperlukan, di antaranya adalah penerapan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi mampu mempercepat proses kerja, dan peningkatan efisiensi ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, sebelum menerapkan teknologi informasi, pengujian yang komprehensif harus dilakukan untuk memastikan kualitas hasil pengolahan teknologi tersebut sehingga efektivitasnya dapat terjamin (Karmita et al., 2015).

Pengelolaan keuangan di pemerintah daerah harus mematuhi prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan undang-undang yang mengatur keuangan negara dan pemerintahan daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melalui penyampaian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, laporan keuangan ini kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum. Komponen laporan keuangan ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Efektivitas

pengelolaan keuangan tergantung pada kemampuan sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, tepat waktu, dan akurat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor teknologi, lingkungan, dan struktur organisasi di mana sistem tersebut beroperasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015), tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai situasi keuangan, performa keuangan, dan aliran kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Informasi dianggap bermanfaat jika dapat diandalkan dan digunakan oleh para pengguna informasi tersebut untuk mendukung keputusan yang diambil, sesuai dengan penelitian Kiranayanti, (2016) Untuk memastikan terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, beberapa faktor harus diperhatikan, di antaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern, sebagaimana yang disarankan oleh (Ernawati, 2019)

Kondisi lingkungan kerja juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan selain dari faktor sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi. Lingkungan kerja merujuk pada kondisi di mana para karyawan bekerja di suatu perusahaan, yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu secara langsung maupun tidak langsung. Suatu lingkungan kerja dikatakan baik atau kondusif jika karyawan dapat bekerja dengan optimal, merasa tenang, dan meningkatkan produktivitas mereka sehingga membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin baik atau kondusif lingkungan kerja, semakin membantu karyawan dalam meningkatkan kinerja mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Saydam, (2000), lingkungan kerja mencakup semua fasilitas dan infrastruktur yang mempengaruhi karyawan saat bekerja, dan dapat berdampak langsung pada kinerja individu tersebut.

Kota Makassar, sebagai salah satu pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun (2005) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran, melakukan pelaporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan daerah, melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, dan menyediakan statistik keuangan daerah. Efektivitas pengelolaan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar menjadi faktor kunci dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan keuangan OPD sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kondisi lingkungan kerja yang mendukung kinerja pegawai. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menguji apakah pengetahuan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan lingkungan kerja memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah di Kota Makassar.

Manajemen keuangan di berbagai instansi, baik perusahaan maupun pemerintah, merupakan elemen yang paling vital dalam menjalankan aktivitas untuk kelangsungan operasional. Menurut paragraf 24 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP), laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan dan seluruh transaksi yang terjadi di entitas pelaporan selama periode tertentu. Pelaporan keuangan adalah suatu

proses dan struktur yang menggambarkan cara informasi keuangan disiapkan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan ekonomi dan sosial negara.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) laporan keuangan merupakan bagian esensial dari proses pelaporan keuangan. Biasanya, laporan keuangan komprehensif melibatkan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (seperti laporan arus kas atau arus dana), catatan, laporan tambahan, dan materi penjelasan yang menjadi bagian penting dari laporan keuangan. Secara umum, tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas, yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomis.

Kualitas laporan keuangan perusahaan ditentukan oleh sejauh mana informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat kepada pengguna serta bagaimana penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan kerangka konseptual, prinsip dasar, dan tujuan akuntansi. Laporan keuangan menjadi salah satu alat penting bagi pemakai dalam mengukur kualitas perusahaan dan kemampuan mereka untuk memberikan keputusan bisnis yang tepat. Manajemen perusahaan, khususnya, sangat bergantung pada laporan keuangan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan yang akurat. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang diperoleh harus memenuhi standar tertentu yang ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juga menyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Republik Indonesia, 2000) menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Pada peraturan ini juga sudah mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab berdasarkan azas keadilan dan kepatutan.

Selain itu sistem pengelolaan keuangan daerah juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah meliputi rencana, pelaksana, hingga pemngawasan keuangan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 (BPK, 2006), menyebutkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah selama satu periode. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan juga dapat dipahami.

Mardiasmo, (2012:134), Bulan et al., (2017) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila organisasi berhasil mencapai tujuan tersebut, maka dikatakan bahwa organisasi tersebut beroperasi secara efektif. Efektivitas merupakan elemen yang sangat penting dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh setiap organisasi. Kurniawan, (2005:109) menjelaskan bahwa efektivitas mencakup kemampuan suatu organisasi untuk menjalankan tugas, fungsi, operasi, kegiatan, atau misi tanpa adanya konflik atau hambatan dalam pelaksanaannya. Sinaga (2014) juga menambahkan bahwa efektivitas melibatkan penggunaan sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur dalam jumlah yang telah ditetapkan secara sadar sebelumnya untuk menghasilkan hasil kerja yang tepat waktu.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana program atau kegiatan berhasil mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan oleh organisasi. Efektivitas mengukur sejauh mana manajemen mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Lebih jauh, efektivitas merupakan indikator keberhasilan atau prestasi dari manajemen yang diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi, lebih menitikberatkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan lingkungan kerja terhadap efektivitas pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah di Kota Makassar. Pendekatan penelitian kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian ini. Sesuai dengan Sugiyono, (2015), metode kuantitatif adalah pendekatan yang diterapkan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak. Data kemudian dianalisis menggunakan instrumen statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, metode penelitian deskriptif juga digunakan, yang merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan kondisi atau fenomena tertentu seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono, (2015).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono, (2015) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai OPD yang ada di Pemerintah Kota Makassar.

Pengambilan sampel dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan ciri-ciri atau kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono, (2015) teknik *Purposive Sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pada jenis atau kriteria yang ditetapkan oleh peneliti yang dapat memberikan informasi yang diinginkan karena sampel tersebut adalah satu-satunya yang memiliki atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan peneliti.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah pegawai yang bertugas pada bagian keuangan atau berhubungan dengan pengeloan keuangan yang berfungsi sebagai entitas akuntansi yang menkonsolidasi laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Makassar.

Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara daring melalui aplikasi *google form* dengan melakukan penyebaran kuesioner/angket kepada pegawai yang bertugas pada bagian keuangan atau berhubungan dengan pengeloan keuangan yang berfungsi sebagai entitas akuntansi yang menkonsolidasi laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

Sugiyono, (2015) kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Peneliti juga melakukan metode tinjauan kepustakaan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan. Selain itu, peneliti juga mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

Pengukuran Variabel Penelitian

Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Sikap	<i>ordinal</i>
2	Teknologi Informasi (X2)	1. Penggunaan Internet 2. Ketersediaan perangkat keras /Lunak	<i>ordinal</i>

3	Lingkungan Kerja (X3)	1. Penerangan yang cukup 2. Suhu udara ideal 3. Kebisingan suara 4. Ruang kerja yang memadai 5. Hubungan dengan rekan kerja	<i>ordinal</i>
4	Efektivitas Pengelolaan Keuangan (Y)	1. Kepatuhan Peraturan 2. Realisasi Keuangan 3. Identifikasi masalah	<i>ordinal</i>

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2024

Adapun metode skala pengukuran yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2015). Jawaban setiap instrument ini menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Dan adapun jawaban diberi skor :

SS	= Sangat Setuju	(skor 5)
S	= Setuju	(skor 4)
N	= Netral	(skor 3)
TS	= Tidak Setuju	(skor 2)
STS	= Sangat Tidak Setuju	(skor 1)

Analisis Data

Pada penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik inferensial yaitu statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan (diinferensialkan) untuk populasi dimana sampel diambil, Sugiyono, (2015) Analisis statistik inferensial dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen berupa Kompetensi Sumber Daya Manusia (x1), Teknologi Informasi (x2), Lingkungan Kerja (x3) dengan variabel dependen yaitu Efektivitas Pengelolaan Keuangan (y). Model persamaan yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan terlebih dahulu pada penulisan ini, adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Efektivitas Pengelolaan Keuangan
α	= Konstan
X1	= Pengetahuan Sumber Daya Manusia
X2	= Teknologi Informasi
X3	= Lingkungan Kerja
β_1	= Koefisien regresi Pengetahuan Sumber Daya Manusia
β_2	= Koefisien regresi Teknologi Informasi
β_3	= Koefisien regresi lingkungan kerja
e	= Komponen error

HASIL

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Makassar, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia dan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, memegang peran penting sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sebagai kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar berfungsi sebagai pusat perdagangan, industri, pemerintahan, dan jasa. Selain itu, sebagai simpul jasa angkutan dan pusat pelayanan pendidikan serta kesehatan, Kota Makassar memainkan peran utama dalam pengembangan wilayah ini.

Administratif, Kota Makassar terbagi menjadi 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Tujuh kecamatan di antaranya berbatasan langsung dengan pantai, seperti Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya, sementara satu kecamatan merupakan kepulauan, yaitu Sangkarrang. Dengan letaknya dekat dengan pantai, Kota Makassar dikenal sebagai "Waterfront City" yang dilalui beberapa sungai, seperti Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang. Kota ini terletak pada ketinggian antara 0-25 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 1.432.189 jiwa, dengan beragam suku bangsa seperti Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa yang menetap di kota ini. Kota Makassar juga berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Pangkajene Kepulauan di utara, Kabupaten Maros di timur, serta Kabupaten Gowa di selatan dan barat dengan Selat Makassar.

Paparan dan Analisis Data

Identitas Responden

Adapun rincian jumlah penyebaran Kuesioner secara online (daring) melalui aplikasi *google form* dan respon responden terhadap kuesioner dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Rincian Pengembalian Kuesioner

KETERANGAN	TOTAL
Kuesioner yang disebar	63
Total Kuesioner yang direspon	56
Kuesioner yang tidak direspon	7
Kuesioner yang layak di uji	56
Tingkat Pengambilan yang digunakan	89%

$$\text{Responden Rate } \frac{56}{63} \times 100\% = 89\%$$

Sumber : Hasil Olah Data Peeneliti, 2024

Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai yang bertugas dibagian pengelolaan keuangan pada organisasi perangkat daerah. Peneliti menyebarkan 63 kuesioner melalui

daring. Dari 63 kuesioner yang telah tersebar terdapat 56 respon dari responden dan 7 kuesioner yang tidak direspon, sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 56 (89%).

Deskripsi Data Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Deskripsi merupakan penjelasan berupa analisis tanggapan responden melalui penyebaran kuesioner. Berikut adalah rekapitulasi skor jawaban responden terhadap variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) sebagai berikut:

Tabel 3. Tanggapan responden terhadap variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%)										Skor
		SS (5)		S (4)		N(3)		TS (2)		STS (1)		
		F	%	F	%	f	%	F	%	f	%	
1	X1.1	6	13.4	43	77.1	7	9.42	0	0	0	0,0	223
2	X1.2	13	27.5	42	71.1	1	1.27	0	0	0	0,0	236
3	X1.3	14	30.7	33	57.8	8	10.5	2	0.88	0	0,0	228
4	X1.4	8	18.8	32	60.3	12	16.9	8	3.77	0	0,0	212
5	X1.5	8	17.4	45	78.6	3	3.93	0	0	0	0,0	229
6	X1.6	17	35.2	39	64.7	0	0	0	0	0	0,0	241
Rata-Rata												228

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pernyataan yang paling tinggi nilai skornya yakni item X1.6 nilai skornya sebesar 241 dan yang paling rendah item X1.4 nilai skornya sebesar 212, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan nilai rata-rata sebesar 228 berada pada range ke keempat yaitu tinggi

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Hasil pengujian validitas data untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia(X1) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Pengujian validitas data untuk variabel X1

Nomor Pernyataan	Item	Nilai Korelasi (Person correlation)	Probabilitas Korelasi sig.(2-tailed)	Kesimpulan
X1.1		0,490	0,000	Valid
X1.2		0,619	0,000	Valid
X1.3		0,774	0,000	Valid
X1.4		0,613	0,000	Valid

X1.5	0,645	0,000	Valid
X1.6	0,424	0,001	Valid

Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan atas variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) memiliki nilai Person Correlation dengan tingkat signifikansi 5 persen (0.05) sehingga dapat dikatakan semua item pernyataan adalah valid karena sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0.05.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan (Y)

Tabel 5. Hasil uji t (Parsial)

Coefficients^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	-1.176	.245
	Kompetensi SDM (x1)	4.843	.000
	Dependent Variable : Efektivitas Pengelolaan Keuangan (Y)		

Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.21 dimana nilai *t hit* untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 4.843 dan tidak signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha=0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai *t tab* dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas = $56-1-1 = 54$ maka diperoleh nilai *t tab* 2,005. Oleh karena itu nilai *t hit* untuk koefisien variable Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 4.843 lebih besar dari *t tab* sebesar 2,005 maka pada tingkat kekeliruan 5% H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan (Y).

PEMBAHASAN

Hipotesis pertama yang diajukan secara parsial menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Dari analisis statistik, diperoleh nilai *t* sebesar 4.843, yang jauh lebih besar dari nilai kritis *t* sebesar 2.005, dengan tingkat signifikansi 0.000, lebih kecil dari α 0.05. Oleh karena itu, hipotesis null ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia secara positif dan signifikan memengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Artinya, semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia pegawai OPD dalam memahami tugas yang diberikan, menguasai Peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan, aktif mengikuti pelatihan teknis pengelolaan keuangan, memiliki pengetahuan atau latar belakang pendidikan yang relevan, memiliki kewenangan pekerjaan sesuai dengan keahlian, dan menekankan pada etika dan kode etik, maka akan menghasilkan Efektivitas Pengelolaan

Kuangan yang lebih baik dan efektif. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dasar pegawai dapat menyebabkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan yang buruk dan tidak efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden, yang merupakan Pegawai atau staf yang bertugas sebagai pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan tingkat Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik. Sebanyak 75% dari mereka memiliki latar belakang pendidikan S1, yang dapat mengimplementasikan pengetahuan dasar keuangan, sehingga berkontribusi pada Efektivitas Pengelolaan Keuangan yang baik. Penemuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Setya et al., 2017) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.

SIMPULAN

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa hipotesis pertama, yaitu H1: Pengaruh positif Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, dapat diterima. Hal ini terbukti dari nilai t sebesar 4.843, yang secara signifikan ($p < 0.05$) melampaui nilai kritis t sebesar 2.005, dan nilai signifikansi sebesar 0.000, yang lebih kecil dari alpha (0.05). Dengan demikian, disimpulkan bahwa peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar berdampak positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia mencakup pemahaman akan tugas yang diberikan, pengetahuan mengenai Peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan, partisipasi dalam pelatihan teknis, pendidikan yang relevan, penugasan sesuai dengan keahlian, dan penerapan etika. Hal ini berkontribusi pada tercapainya Efektivitas Pengelolaan Keuangan yang optimal. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dasar pegawai akan berdampak negatif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan. Analisis juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yang terdiri dari pegawai atau staf yang bertugas sebagai pengelola keuangan di OPD Kota Makassar, memiliki tingkat Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik. Sebanyak 75% dari mereka merupakan lulusan S1, yang memiliki pengetahuan dasar keuangan yang kuat dan dapat mengimplementasikannya secara efektif dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mencapai Efektivitas Pengelolaan Keuangan yang optimal di Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

REFERENSI

- BPK. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Bulan, S. G. I., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. (2017). Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 263–271. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17214.2017>

- Hastomo, W., Meiriki, A., & Saputro, A. E. (2021). Seberapa Efektifkah Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menunjang Inovasi Otonomi Daerah? Analisis Kota Bogor. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2, 116–123. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3568>
- Ida Ayu Enny Kiranayanti, N. M. A. E. (2016). PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMAHAMAN BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *PSAK No.1 Penyajian Laporan Keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan*, 1, 24.
- Karmita, S. B., Supartha, I. W. G., & Priantini, P. S. (2015). TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA ANALIS KREDIT PT. BPD BALI CABANG UTAMA DENPASAR) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD), Bali, 12, 947–974.
- Koromath, J. P. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari. *Lensa Ekonomi*, 11(01), 13. <https://doi.org/10.30862/lensa.v11i01.75>
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. PT Gramedia Pusaka Utama.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- PEMERINTAH PUSAT. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-12-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. (n.d.).
- Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*. 4–7.
- Saydam, G. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Mikro (Dalam Tanya Jawab)*. Djambatan.
- Setya, H., Indriani, P., & Terzaghi, T. M. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah MBiA*, 17(1), 45–54.
- Sinaga, I., & Ab, M. (2014). The Effect of Marketing Public Relations on Brand Image. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS*, 2(2), 184–189. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/153>



Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. CV. Alfabeta.

Yamti Anasari, Fidyah Yuli Ernawati, R. B. (2019). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CITRA MEREK PRODUK SABUN LIFEBOUY. *Jurnal Capital Kebijakan Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 1(1).